

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan terhadap pendapatan perkapita suatu daerah. Pembangunan ekonomi memberikan manfaat dan dampak positif terhadap suatu daerah untuk meningkatkan dan melancarkan proses pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah.

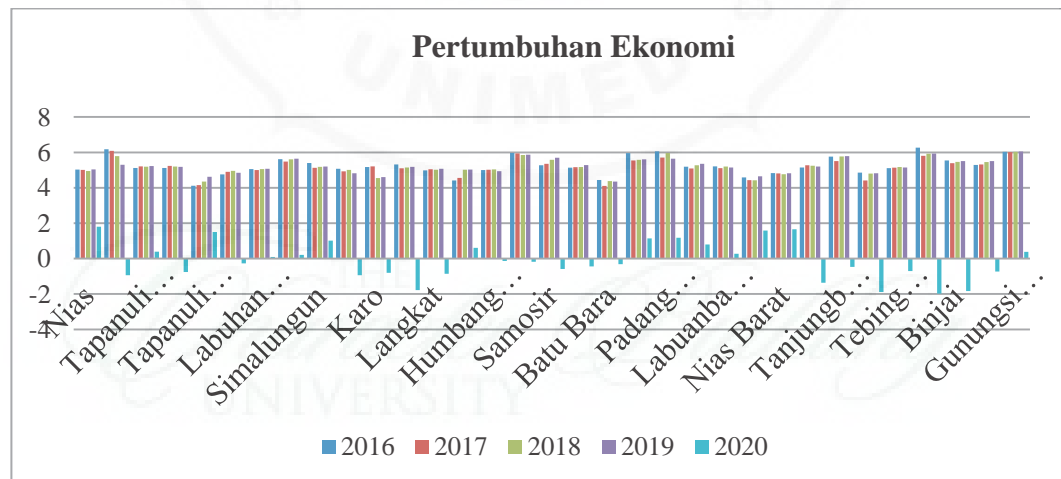
Pertumbuhan Ekonomi dapat bernilai positif dan juga bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan pada periode tersebut mengalami peningkatan dan sebaliknya jika suatu periode mengalami pertumbuhan negatif maka kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Desentralisasi merupakan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari adanya pelaksanaan asas desentralisasi. Menurut UU No.23 Tahun 2014, Desentralisasi Fiskal diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gustiana (2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Sumatera Utara (diolah)

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2016 hingga 2020. Sebanyak 19 kabupaten kota atau sebesar 58 persen wilayah Sumatera Utara mengalami kontraksi ekonomi. Pada tahun 2019, mayoritas pertumbuhan ekonomi

kabupaten kota berkisar pada angka 5 persen, bahkan Kota Gunung Sitoli mampu tumbuh mencapai angka 6,05 persen. Namun akibat pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi kabupaten kota hanya dapat dicapai pada angka 1,80 persen yaitu oleh Kabupaten Nias. Menyusul Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara yang mencapai pertumbuhan sebesar 1,66 persen dan 1,58 persen secara berurutan.

Kontraksi terdalam dialami oleh Kota Medan yaitu sebesar 1,98 persen, diikuti oleh Kota Pematangsiantar yaitu sebesar 1,89 persen, Kota Binjai yaitu sebesar 1,83 persen dan Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 1,78 persen. 2 wilayah yang peranannya mencapai 2 digit dari total nilai tambah Sumatera Utara yaitu Medan dan Deli Serdang, mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi yang terjadi. Semua daerah perkotaan mengalami kontraksi kecuali Kota Gunung Sitoli (tumbuh sebesar 0,38 persen) yang berada di Kepulauan Nias. Namun demikian, pertumbuhannya pun cukup signifikan turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mampu mencapai pertumbuhan diatas 6 persen.

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk mengamati hasil-hasil pembangunan ekonomi suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Selain itu, indikator ini juga memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi pada kemajuan daerahnya (Kuncoro, 2004).

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, adanya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan (Syukri & Didiharyono, 2018).

Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

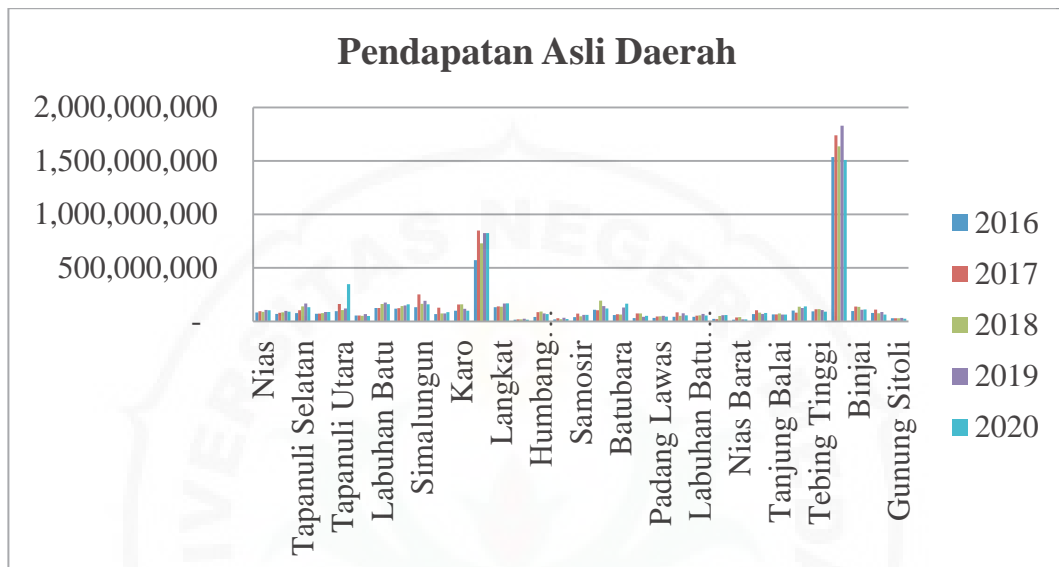
sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2006: 338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2006: 354).

Desentralisasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut penelitian Gustiana (2014) Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan dibidang industri atau memiliki sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan disisi ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagian Daerah dari Hasil Pajak Pusat. (Windha:2013).

Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



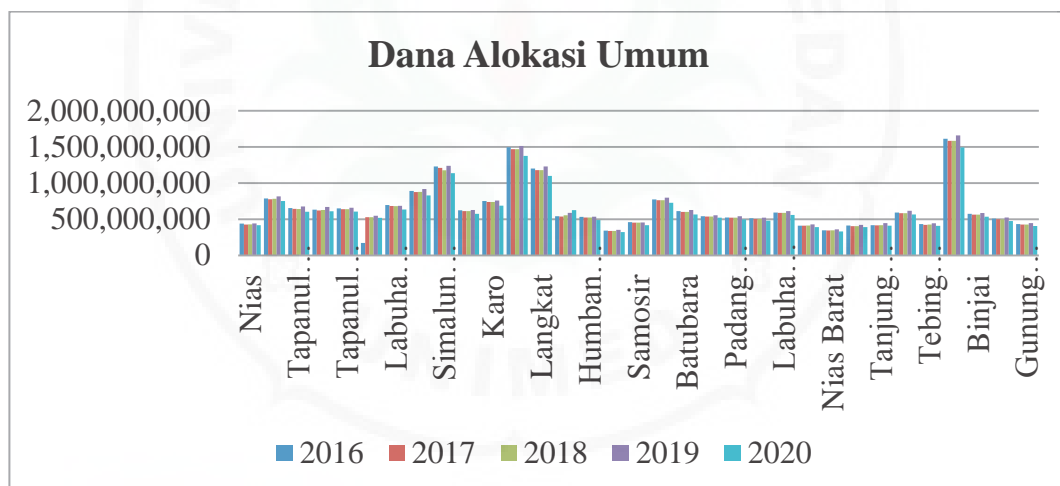
Sumber : BPS Sumatera Utara dalam angka 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami fluktuasi, dimana Pendapatan asli Daerah kabupaten Nias pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, jika dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias juga menurun di tahun 2020 sehingga dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi turunnya Pertumbuhan Ekonomi, hal tersebut dipengaruhi oleh pemerintah daerah yang kurang mampu menggali potensi-potensi dari daerahnya sehingga tidak dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun nya.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum dapat didistribusikan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Gambar 1.3 Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Sumatera Utara dalam angka 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.3 Terlihat bahwa Dana Alokasi umum di Kabupaten/Kota mengalami Fluktuasi di setiap tahunnya, jika dilihat Dana Alokasi Umum Kabupaten Nias pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sama hal nya dengan Pertumbuhannya di tahun 2020 yang juga mengalami penurunan, Jika dilihat Dana Alokasi Umum yang tertinggi di tahun 2020 adalah Kota Medan walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2019 dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan juga mengalami penurunan

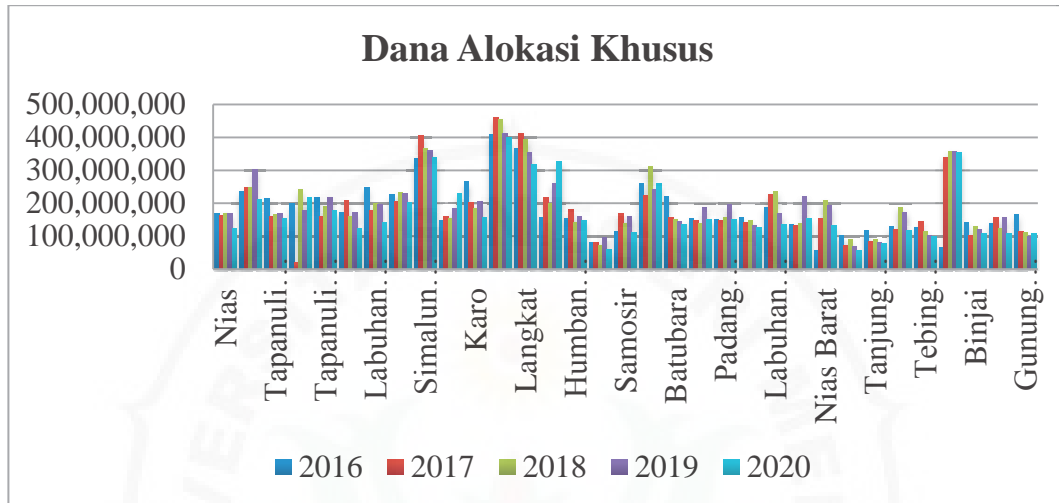
sehingga turunnya Dana Alokasi Umum mempengaruhi turunnya Pertumbuhan Ekonomi, Hal tersebut disebabkan oleh dana APBN yang tidak merata.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik.

Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik

Gambar 1.4 Dana Alokasi Khusus di kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Sumatera Utara dalam angka 2016-2020

Berdasarkan gambar 1.4 Terlihat bahwa terjadinya Fluktuasi Dana Alokasi Khusus di seluruh Kabupaten/Kota, dimana Dana Alokasi Khusus di setiap kabupaten/Kota mengalami Penurunan dan Kembali naik di tahun 2016-2020 sehingga dapat dilihat bahwa terjadinya ketimpangan antara Dana Alokasi Khusus dan pertumbuhan Ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota. Terlihat bahwa Dana Alokasi Khusus Kabupaten Nias juga mengalami penurunan di tahun 2020, Sehingga jika dilihat jumlah Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonominya di setiap tahun sama-sama mengalami Fluktuasi, hal ini disebabkan oleh dana APBN yang kecil sehingga pemerintah daerah kurang mampu untuk menggunakan dana tersebut bagi pembangunan fisik daerah sehingga akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya

dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati, 2010).

Berdasarkan dari latar belakang di atas diketahui bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mengalami Fluktuasi dari tahun 2016-2020 sehingga peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sehingga, diharapkan suatu daerah dapat mengoptimalkan komponen - komponen dan kemampuan yang dimiliki daerahnya, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah maka judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih ada ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara

2. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum mampu menggali potensi di daerahnya sehingga masih adanya ketimpangan terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Perolahan DAK dan DAU ternyata belum mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, peneliti membatasi masalah pada:

1. Pembatasan aspek pada penelitian ini hanya terhadap laporan Pertumbuhan Ekonomi yang berkaitan dengan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020
2. Melihat seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi dari Kebijakan Pemerintah
3. Penyebab Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan dana Perimbangan yang cenderung berfluktuasi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020?

2. Apakah Terdapat Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2020?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2020?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

b) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan, terutama Pemerintah Daerah didalam mengelola Daerahnya.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.